

ANALISIS KEMISKINAN DI PERKOTAAN TERHADAP AKSES PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGANGGURAN GENERASI MUDA

¹Nazwa Wafiq Nur Azizah, ²Yani Achdiani

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Email: nazwawafiq29@upi.edu, yaniachdiani@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan di perkotaan terhadap akses pendidikan dan dampaknya terhadap pengangguran di kalangan generasi muda. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menggali pengalaman enam narasumber yang merupakan lulusan SMA, D3, dan S1 yang tengah menganggur atau aktif mencari kerja di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, display, dan verifikasi model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak langsung pada keterbatasan akses pendidikan, seperti tidak mampu melanjutkan kuliah atau kesulitan mengikuti pelatihan kerja. Selain itu, terdapat ketimpangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, yang menyebabkan lulusan berpendidikan tinggi tetap mengalami pengangguran karena kurangnya soft skill, pengalaman kerja, dan koneksi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi pengangguran pemuda, diperlukan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan dunia industri untuk menciptakan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: kemiskinan, akses pendidikan, pengangguran pemuda, studi kasus, pendidikan tinggi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of urban poverty on access to education and its impact on youth unemployment. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, this research explores the experiences of six informants who are high school, D3, and S1 graduates who are currently unemployed or actively looking for work in Bandung City. Data were collected through observation and in-depth interviews, then analyzed using the Miles & Huberman model of data reduction, display, and verification techniques. The results showed that poverty has a direct impact on limited access to education, such as not being able to continue college or having difficulty participating in job training. In addition, there is an imbalance between the world of education and the needs of industry, which causes highly educated graduates to remain unemployed due to a lack of soft skills, work experience, and social connections. This study concludes that to reduce youth unemployment, collaboration between educational institutions, government and industry is needed to create an education system that is adaptive to the needs of the labor market. This research makes an important contribution in formulating more inclusive and equitable employment and education policies.

Keywords: poverty, access to education, youth unemployment, case study, higher education.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu isu besar di dalam perekonomian Indonesia, seolah-olah menjadi “pekerjaan rumah” yang belum dapat terselesaikan. Usaha pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebenarnya sudah ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari program bantuan modal atau uang tunai kepada rakyat miskin sampai program transmigrasi (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018)

Pengangguran merupakan masalah penting bagi setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mengatasinya memerlukan perhatian khusus karena efeknya dapat dirasakan oleh semua orang, bahkan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Pasar tenaga kerja saat ini mengalami perubahan yang signifikan di era globalisasi saat ini, yang cenderung berkorelasi dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mendorong kebutuhan akan pasar tenaga kerja yang lebih berkualitas dan berkelanjutan untuk bersaing di era digital, baik di tingkat nasional maupun internasional, menghadapi perubahan landscape pekerjaan yang begitu cepat (Franit & Fuady, 2019).

Tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, pengangguran terbuka di kalangan lulusan perguruan tinggi masih lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya berpendidikan SMA atau SMK. Bahkan, berdasarkan laporan dari World Bank pada tahun yang sama, lebih dari 10% lulusan sarjana belum mendapatkan pekerjaan setelah lulus, menunjukkan adanya disparitas antara tingkat pendidikan dan kesiapan kerja.

Fenomena ini menciptakan kontradiksi di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) menggambarkan adanya fluktuasi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan di setiap tahunnya. Hal ini sangat menarik untuk dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dian Safitri, Riska. Rezza, Muh (2025) dengan menyoroti angka pengangguran tertinggi di kalangan lulusan SMK dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.

Fenomena pengangguran di kalangan generasi muda ini memiliki dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, namun kenyataannya, banyak lulusan sarjana yang terjebak dalam ketidakpastian pekerjaan. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mencari solusi atas masalah pengangguran yang berdampak pada ketahanan ekonomi negara serta masa depan generasi muda yang sangat bergantung pada dunia kerja yang berkualitas.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih dalam mengenai dinamika pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan, dengan menyoroti generasi muda sebagai kelompok yang paling terpengaruh. Novelty dari penelitian ini adalah fokus pada analisis mendalam terhadap penyebab utama pengangguran yang mungkin terabaikan, seperti ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dan kebutuhan industri, serta faktor-faktor eksternal lain yang turut berperan.

KONSEP TEORI

Teori Modal Sosial – Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis kontemporer, mengembangkan teori modal sosial yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ketimpangan sosial direproduksi dari generasi ke generasi. Berbeda dengan pandangan konvensional yang hanya melihat kemiskinan sebagai ketiadaan uang, Bourdieu menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan mengidentifikasi empat bentuk modal yang saling berkaitan dan menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial.

Modal ekonomi merujuk pada sumber daya material dan finansial yang dimiliki individu atau keluarga, seperti pendapatan, properti, dan aset keuangan. Dalam konteks pendidikan, modal ekonomi menentukan kemampuan keluarga untuk membiayai biaya sekolah, membeli buku, mengakses teknologi pembelajaran, atau bahkan memenuhi kebutuhan dasar seperti transportasi dan nutrisi yang mendukung proses belajar. Keterbatasan modal ekonomi pada keluarga miskin di perkotaan secara langsung membatasi akses anak-anak mereka terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, atau bahkan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Modal kultural mencakup pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan selera yang diperoleh melalui sosialisasi dalam keluarga dan lembaga pendidikan. Modal ini termanifestasi

dalam tiga bentuk: embodied (disposisi pikiran dan tubuh yang tertanam), objectified (kepemilikan barang budaya seperti buku, karya seni), dan institutionalized (kredensial pendidikan formal). Keluarga kelas menengah atas biasanya mewariskan modal kultural kepada anak-anak mereka melalui pembiasaan membaca, kunjungan museum, atau pengenalan terhadap norma-norma akademik. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap modal kultural ini, yang menyebabkan mereka kesulitan beradaptasi dengan tuntutan sistem pendidikan formal yang dirancang dengan asumsi bahwa semua siswa memiliki modal kultural yang setara.

Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok yang dapat dimobilisasi untuk mendapatkan sumber daya atau peluang. Dalam dunia kerja, modal sosial sering kali menjadi faktor penentu yang sama pentingnya—atau bahkan lebih penting—daripada kualifikasi akademik. Koneksi keluarga, kenalan dari almamater, atau jaringan profesional dapat membuka pintu kesempatan kerja yang tidak diakses melalui jalur formal. Generasi muda dari keluarga miskin umumnya memiliki jaringan sosial yang terbatas pada lingkungan mereka sendiri, yang juga menghadapi keterbatasan serupa, sehingga mereka kesulitan mengakses informasi tentang lowongan pekerjaan atau mendapatkan rekomendasi yang kredibel.

Modal simbolik adalah prestise, pengakuan, atau legitimasi yang diperoleh dari akumulasi modal-modal lainnya. Ini berkaitan dengan reputasi, status sosial, dan bagaimana seseorang dipersepsikan dalam masyarakat. Dalam konteks pencarian kerja, modal simbolik dapat berupa prestise institusi pendidikan tempat seseorang lulus, pengalaman magang di perusahaan ternama, atau bahkan cara berbicara dan berpenampilan yang "profesional" sesuai standar kelas menengah. Lulusan dari keluarga miskin, meskipun memiliki gelar yang sama, sering kali tidak memiliki modal simbolik yang cukup untuk bersaing dalam pasar kerja yang sangat selektif.

Bourdieu menjelaskan bahwa keempat bentuk modal ini saling terkait dan dapat dikonversi satu sama lain, meskipun tidak selalu dengan nilai tukar yang setara. Misalnya, modal ekonomi dapat digunakan untuk membeli akses ke pendidikan berkualitas (modal kultural) atau membangun jaringan melalui klub eksklusif (modal sosial). Namun, konversi ini lebih mudah dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki modal yang cukup, sementara kelompok miskin menghadapi hambatan struktural yang membuat mobilitas sosial menjadi sangat sulit.

Dalam konteks penelitian ini, teori modal sosial Bourdieu sangat relevan untuk menjelaskan mengapa kemiskinan tidak hanya membatasi akses fisik terhadap pendidikan, tetapi juga menciptakan hambatan berlapis yang membuat lulusan dari keluarga miskin tetap menghadapi pengangguran meskipun telah memperoleh kredensial pendidikan formal. Keterbatasan modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik secara bersamaan menciptakan siklus reproduksi ketimpangan yang sulit diputus, di mana pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan di pasar kerja tanpa didukung oleh modal-modal lainnya.

Teori Kredensialisme – Randall Collins

Randall Collins, sosiolog Amerika yang dikenal dengan karyanya tentang sosiologi pendidikan dan stratifikasi, mengembangkan teori kredensialisme yang menantang asumsi fungsionalis bahwa pendidikan berfungsi terutama untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Collins berpendapat bahwa sistem pendidikan modern lebih berfungsi sebagai mekanisme alokasi status sosial daripada sebagai institusi pengembangan kompetensi teknis.

Menurut Collins, kredensial pendidikan—seperti ijazah, gelar, atau sertifikat—telah menjadi komoditas yang diperebutkan dalam kompetisi status grup. Dalam masyarakat modern, kredensial berfungsi sebagai cultural currency yang menandakan keanggotaan seseorang dalam kelompok status tertentu. Perusahaan dan organisasi menggunakan kredensial sebagai screening device untuk menyaring pelamar, bukan karena kredensial tersebut menjamin bahwa pemegangnya benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan, tetapi karena kredensial memberikan sinyal tentang latar belakang kelas dan kemampuan untuk mengikuti norma-norma organisasional tertentu.

Fenomena sentral dalam teori Collins adalah inflasi kredensial (*credential inflation* atau *education inflation*). Ketika semakin banyak orang memperoleh tingkat pendidikan tertentu, nilai pasar dari kredensial tersebut menurun. Pekerjaan yang dulu dapat diakses dengan ijazah SMA kini memerlukan gelar sarjana; pekerjaan yang dulu cukup dengan gelar sarjana kini memerlukan gelar master. Inflasi ini terjadi bukan karena pekerjaan tersebut menjadi lebih kompleks secara teknis, tetapi karena pemberi kerja meningkatkan persyaratan pendidikan sebagai cara untuk membedakan pelamar dalam kondisi *oversupply* tenaga kerja terdidik.

Collins menjelaskan bahwa inflasi kredensial menciptakan *credential spiral* atau *spiral kredensial*, di mana individu berlomba-lomba memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi hanya untuk mempertahankan posisi relatif mereka dalam kompetisi pasar kerja. Hasilnya adalah *credential treadmill effect*—seperti berlari di atas *treadmill*, semakin cepat seseorang berlari (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh), posisinya tetap sama karena semua orang lain juga melakukan hal yang sama. Ini menjelaskan mengapa lulusan perguruan tinggi di Indonesia semakin banyak, namun pengangguran terdidik juga meningkat.

Teori Collins juga mengidentifikasi adanya *mismatch* antara apa yang diajarkan di institusi pendidikan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan dalam pekerjaan. Sebagian besar keterampilan kerja, menurut Collins, dipelajari melalui *on-the-job training* dan pengalaman praktis, bukan dari kurikulum formal. Namun, sistem kredensial tetap memaksa individu untuk menghabiskan waktu dan biaya yang signifikan untuk memperoleh gelar yang mungkin tidak relevan dengan pekerjaan mereka nantinya. Ini menciptakan pemborosan sumber daya sosial yang masif dan memperburuk ketimpangan, karena mereka yang mampu membayar pendidikan tinggi dapat memperoleh kredensial meskipun tidak lebih kompeten secara teknis. Dalam konteks generasi muda dari keluarga miskin, teori kredensialisme Collins membantu menjelaskan paradoks yang dihadapi: meskipun mereka berhasil memperoleh gelar sarjana melalui usaha keras dan pengorbanan, mereka tetap menghadapi pengangguran karena beberapa alasan. Pertama, gelar sarjana sudah tidak lagi menjadi pembeda yang signifikan karena inflasi kredensial. Kedua, mereka bersaing dengan lulusan dari institusi yang lebih prestisius atau mereka yang memiliki kredensial tambahan seperti sertifikasi internasional, pengalaman magang di perusahaan besar, atau keterampilan teknis spesifik yang tidak diajarkan dalam kurikulum formal. Ketiga, pemberi kerja sering kali mencari sinyal status kelas yang tidak dapat diberikan hanya melalui gelar akademik, seperti cara berkomunikasi, penampilan, atau jaringan sosial yang dimiliki.

Collins juga menunjukkan bahwa kredensialisme memperkuat stratifikasi sosial dengan cara yang halus namun efektif. Kelompok kelas atas dapat menggunakan sumber daya ekonomi mereka untuk memperoleh kredensial dari institusi elite, yang memiliki nilai simbolik lebih tinggi di pasar kerja. Mereka juga dapat menunda masuk ke pasar kerja untuk memperoleh kredensial tambahan atau mengambil posisi magang tanpa bayaran yang tidak dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan pendapatan segera. Dengan demikian, sistem kredensial yang tampaknya meritokratis sebenarnya melanggengkan privilese kelas dan membatasi mobilitas sosial.

Sintesis: Ketimpangan Berlapis dalam Akses Pendidikan dan Pasar Kerja

Ketika teori modal sosial Bourdieu dan teori kredensialisme Collins diintegrasikan, keduanya memberikan kerangka analisis yang sangat kuat untuk memahami hubungan kompleks antara kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran generasi muda. Bourdieu menjelaskan mengapa anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses dan memanfaatkan pendidikan, sementara Collins menjelaskan mengapa pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan di pasar kerja dalam konteks inflasi kredensial dan kompetisi status grup.

Bersama-sama, kedua teori ini mengungkapkan bahwa sistem pendidikan dan pasar kerja kontemporer tidak sepenuhnya meritokratis sebagaimana yang sering diasumsikan. Sebaliknya, keduanya adalah arena di mana ketimpangan sosial direproduksi melalui mekanisme yang tampaknya netral dan objektif—seperti persyaratan kredensial atau "kesesuaian budaya"—tetapi sebenarnya menguntungkan mereka yang sudah memiliki akumulasi modal yang memadai.

Generasi muda dari keluarga miskin di perkotaan menghadapi tantangan ganda: mereka

harus berjuang keras untuk memperoleh kredensial pendidikan tanpa dukungan modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik yang memadai; dan ketika mereka berhasil memperoleh kredensial tersebut, mereka menemukan bahwa nilai pasar dari kredensial telah menurun karena inflasi, dan mereka masih harus bersaing dengan mereka yang memiliki modal-modal tambahan yang tidak dapat mereka akses. Kondisi ini menciptakan frustrasi struktural yang mendalam dan menjelaskan mengapa pengangguran terdidik tetap menjadi masalah serius meskipun partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika pengangguran yang tergantung pada tingkat pendidikan di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Sumber data penelitian akan dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, di mana tingkat pengangguran di kalangan generasi muda cukup tinggi. Adapun partisipan penelitian adalah lulusan perguruan tinggi dan SMK/SMA yang berusia antara 20-30 tahun dan sedang mencari pekerjaan, baik yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan atau yang masih menganggur. Selain itu, partisipan lainnya adalah akademisi, pekerja industri, dan pembuat kebijakan yang memiliki pandangan terkait kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

Pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian (Lincoln dan Guba, 1985). Dalam hal ini peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenjang pendidikan terhadap tingkat pengangguran di kalangan generasi muda di Indonesia. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana jenjang pendidikan (misalnya, SMA, D3, dan S1) berhubungan dengan tingkat pengangguran yang terjadi, dengan mempertimbangkan faktor mismatch antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh kesiapan kerja dan permintaan pasar tenaga kerja sebagai variabel mediasi yang turut memengaruhi peluang kerja bagi generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sosiologi untuk menganalisis permasalahan ini secara komprehensif, melihat bukan hanya aspek individual, tetapi juga faktor struktural dan sosial yang mempengaruhi pengangguran di kalangan generasi muda.

Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan dan tidak berperan dalam proses produksi barang dan jasa (Mankiw, 2006:131). Menurut teori Keynes yang menyatakan bahwa pengangguran yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap barang dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Artinya, dalam keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi Perusahaan juga menurun dan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang menimbulkan pengangguran. Selanjutnya, dengan turunnya produksi seharusnya diikuti dengan turunnya tingkat upah, tetapi karena tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan peningkatan

pengangguran, inilah penyebab pengangguran karena defisiensi permintaan agregat.

Pada mulanya Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai penduduk berusia 15 tahun keatas yang dalam kondisi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan dapat dilakukan oleh mereka yang sama sekali belum pernah bekerja atau mereka yang pernah bekerja karena suatu hal berhenti atau diberhentikan. Tingkat pengangguran adalah persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan (Mankiw, 2006:159). Menurut Afrida (2003:135). Sedangkan Menurut Sukirno (2010:14), pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya.

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja berusia 15 tahun atau lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan kriteria penduduk berusia 10 tahun ke atas sebagai kelompok tenaga kerja. (Kusumawardani, 2012:15). Namun tidak semua penduduk yang mampu bekerja ini benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja dinamakan angkatan kerja. Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja disebut bukan angkatan kerja, yaitu mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan, dan lain-lain.

Tingkat Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat positif, jika suatu Negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional, maka untuk selanjutnya Negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apapun (Todaro, 2000:384).

Harbison dan Myers menyebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan manusia, keahlian dan keterampilan, serta kemampuan orang-orang dalam suatu masyarakat (Rachbini, 200:123). Dalam hal tersebut dapat diartikan pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib didapat oleh masyarakat. Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Generasi Muda

Dalam istilah "generasi muda", "generasi muda" mengacu pada generasi muda, yang mengandung arti populasi yang sedang membentuk dirinya sendiri. Kata "generasi muda" terdiri dari dua kata, "generasi muda" mengacu pada sifat atau kondisi kelompok usia muda tersebut. Generasi muda telah diajarkan nilai dan kewajiban serta diwarnai oleh kegiatan, seperti kegiatan sosial dan kemsyarakat. Jadi, generasi muda bangsa adalah warga negaranya dalam situasi seperti ini. (Kristino, 2017).

Pengertian Generasi muda erat hubungannya dengan arti generasi muda sebagai generasi penerus. Yang dimaksud Geberasi Muda secara pasti tidak terdapat satu definisi yang dianggap paling tepat akan tetapi banyak pandangan yang mengartikannya tergantung dari sudut masyarakat melihatnya. Namun dalam rangka untuk pelaksanaan suatu program pembinaan bahwa "Generasi Muda" ialah bagian suatu generasi yang berusia 0 –30 tahun. (Kristiono. 2017).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka (1994 : 309) generasi muda berasal dari kata generasi yaitu sekalian orang yang kira –kira sama waktu hidupnya, angkatan atau turunan. Generasi mudaberarti kelompok atau kaum muda.

Hubungan antara pendidikan dan pengangguran

Variabel tingkat pendidikan juga merupakan variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Melalui pendidikan yang diselesaikan seseorang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas Berdasarkan pembinaan sumber daya manusia adalah usaha memperbesar kemampuan produksi seseorang, baik dalam pekerjaan atau kegiatan lain yang dapat mempermudah orang tersebut ditempatkan dalam pekerjaan. Usaha pembinaan sumber daya manusia telah disetujui sebagai salah satu usahapenciptaan kesempatan kerja yang dapat mengurangi pengangguran (Yos Merizal, 2008).

Pendidikan tersebut termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumberdaya manusia, yang mana investasi tersebut dinamakan dengan Human Capital (modal manusia). Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai ketersediaan manusia, dimana nilai ketersediaan manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan manfaat sosial (social benefit) individu dibandingkan dengan sebelum meramalkan pendidikan. (Idris, 2007:69) Dengan tingginya tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pembagian dari penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA terhadap lulusan diploma yang dinotasikan TPSMA dan penduduk yang menamatkan pendidikan sarjana dibagi dengan penduduk lulusan Diploma yang dinotasikan TPS1. Di asumsikan penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA dibagi dengan Diploma (TPSMA) tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga tidak dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja, akibatnya pengangguran meningkat.

Sedangkan, penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir sarjana dibagi dengan tamatan pendidikan diploma (TPS1) mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja. Akibatnya lebih mudah diserap sebagai tenaga kerja dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel tingkat pendidikan yang digunakan meliputi lulusan SLTA dibagi dengan lulusan D3 (TPSMA) dan lulusan S1 dibagi dengan lulusan D3 (TPS1). TPSMA dan TPS1 diduga berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran (TPT).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka dan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di wilayah perkotaan berpotensi besar menghambat akses pendidikan generasi muda. Keterbatasan ekonomi menyebabkan banyak pemuda tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau mengalami keterbatasan dalam memperoleh pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja.

Disparitas antara tingkat pendidikan dan kesiapan kerja menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri (skills mismatch), minimnya pengalaman kerja, serta keterbatasan koneksi sosial memperburuk kondisi ini.

Dengan demikian, penelitian ini mengajukan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara kemiskinan, akses pendidikan, dan pengangguran generasi muda. Untuk itu, diperlukan studi lebih lanjut melalui pendekatan kualitatif guna mengeksplorasi lebih dalam bagaimana fenomena tersebut terjadi di lapangan dan mencari solusi yang relevan secara sosial dan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2016). Tingkat pendidikan dan pengangguran di Indonesia (Telaah serapan tenaga kerja SMA/SMK dan Sarjana). *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 1(1), 250-257.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Statistik, B. P. (2017). *Badan pusat statistik*. Badan Pusat Statistik.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2005). Mixed methods research: Developments, debates, and dilemmas. *Research in organizations: Foundations and methods of inquiry*, 2, 315-326.
- DAN, P. P. P. A. (2020). Proposal penelitian.
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(1), 118-131.
- Latifa, I., & Pribadi, F. (2021). Peran Lembaga Pendidikan Nonformal dalam Mengatasi Pengangguran di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(3), 137-146.
- Mata, A. M. A. I. P., Studi, T. U. S. K. X., & Keahlian, T. G. B. Adi & Fahrudin. 2006. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah (Bahan Pengayaan)*. Jakarta: Unesco Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta Daryanto. 2011. *Media Pembelajaran*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.
- Purnamasari, E. N. I. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 8(01), 123-133.
- Rukin, S. P. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Spradley, J. P. (1979). Interviewing an informant. *The ethnographic interview*, 46, 55- 68.
- Susila, W. R., & Munadi, E. (2007). Penggunaan analytical hierarchy process untuk penyusunan prioritas proposal penelitian. *Informatika Pertanian*, 16(2), 983- 998.
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan nasionalisme generasi muda di Era Globalisasi. *Populika*, 7(1), 12-21.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.